

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik Israel-Palestina terus berlanjut tanpa penyelesaian konkret. Pada 7 Oktober 2023, eskalasi di antara mereka meningkat kembali diawali serangan Hamas dan respons Israel yang terus meningkat setelahnya sampai kini. Israel dengan operasi militernya menyerang infrastruktur sipil penting seperti rumah sakit, universitas, hingga kamp pengungsian (OHCHR, 2024). Israel juga memutus jalur listrik dan air yang menyebabkan kebutuhan primer masyarakat Gaza dan Palestina terhambat. Tindakan seperti ini menyalahi hukum perang dan hukum humaniter internasional, seperti yang telah dilaporkan oleh Human Rights Watch dan International Amnesty (International Amnesty, 2025). Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah memberikan beberapa resolusi mengenai bantuan kemanusiaan dan gencatan senjata tetapi sebagian diantaranya selalu diveto oleh Amerika Serikat (The House of Commons Library, 2025). Israel juga selalu menolak resolusi yang ditawarkan PBB dan mahkamah internasional untuk membuka bantuan kemanusiaan di wilayah Gaza. Situasi ini menciptakan kekhawatiran yang lebih lanjut di antara masyarakat Palestina maupun dunia karena hukum dan diplomasi internasional kurang bekerja secara efektif untuk menghentikan kekerasan.

Kurangnya respons tegas dari komunitas internasional memunculkan tekanan dari elemen masyarakat. Aksi demonstrasi terjadi di berbagai belahan dunia untuk menyuarakan solidaritasnya terhadap Palestina. Selain itu, terdapat advokasi yang dilakukan oleh komunitas masyarakat sipil Palestina untuk melakukan kampanye terstruktur jangka panjang yang dinamakan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS). Gerakan ini diinisiasi oleh Omar Barghouti dan Ingrid Jaradat bersama dengan puluhan komunitas masyarakat Palestina tepatnya pada tanggal 9 Juli 2005 (Palestinian BDS National Committee, 2024). Gerakan BDS dibentuk karena kekalahan Palestina dalam Intifada Kedua dan wafatnya Yasser Arafat yang sebagai simbol perjuangan nasional (Thrall, 2018). Komunitas masyarakat Palestina menganggap bahwa komunitas internasional gagal meminta pertanggungjawaban dari Israel yang terus melanggar hukum kemanusiaan dan membiarkan banyak perusahaan mendukung Israel untuk tetap melancarkan aksi penyerangannya (Palestinian BDS National Committee, n.d.). Oleh karena itu, mereka menggunakan jalur kampanye ini untuk menggalang solidaritas secara global dalam memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan masyarakat Palestina.



Gambar 1. 1. Logo Gerakan BDS

Sumber: <https://bdsmovement.net/>

Gerakan BDS merupakan gerakan kampanye yang beroperasi secara transnasional dimulai dari masyarakat Palestina, sebagai bentuk perjuangan nonbersenjata. Tujuan dari gerakan ini berfokus pada tiga hal: mengakhiri pendudukan Israel terhadap Palestina, mengambil hak kembali warga Palestina sepenuhnya, dan kesetaraan bagi warga Palestina di Israel. Tujuan tersebut selaras dengan nilai-nilai yang ada di norma global, yaitu kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Ketiga nilai tersebut merupakan nilai yang secara universal diakui dalam instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (Baumgart-Ochse, 2017). Masyarakat Palestina yang hingga kini masih menghadapi pendudukan, pengusiran paksa, dan pembatasan hak kemanusiaan juga mengalami ketiadaan mekanisme internasional yang seharusnya menyokong kebutuhan dasar mereka. Situasi inilah yang menjadi isu sentral gerakan BDS—bahwa tekanan harus datang dari masyarakat global ketika komunitas internasional gagal bertindak.

BDS secara langsung menarik dukungan masyarakat internasional untuk menolak tindakan Israel yang telah melanggar hukum internasional dengan memberikan tekanan melalui boikot, divestasi, dan sanksi terhadap

produk atau perusahaan yang terhubung dengan Israel. Sifat dari gerakan ini adalah transnasional, dengan berangkat dari masyarakat Palestina, tetapi aktivitas kampanye dan promosi nilai yang dibawa gerakan BDS tersebar secara global dengan memanfaatkan teknologi komunikasi saat ini. Berfokus pada media sosial, gerakan ini menjalankan mayoritas kampanye mereka dalam platform digital, membagikan konten dan memberikan publik untuk terlibat langsung dalam isu gerakan.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa gerakan BDS termasuk dalam jenis *transnational advocacy networks* (TANs) yang menggunakan kekuatan moral untuk memobilisasi dukungan publik serta membangun resonansi nilai solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. *Boycott* berarti menarik segala bentuk dukungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Israel seperti politik, kegiatan olahraga, budaya, pendidikan, hingga perusahaan. *Divestment* berarti upaya untuk mendesak bank, lembaga legislatif, lembaga keagamaan, universitas, pengelola dana pensiun agar menarik investasi dari Israel, perusahaan yang terhubung dengan Israel, hingga pihak internasional yang terhubung dengan Israel. *Sanction* berarti usaha untuk menekan pemerintah agar mematuhi kewajiban hukum untuk mengakhiri praktik apartheid yang dilakukan Israel, mengakhiri perdagangan militer dan perdagangan bebas, serta menanggukkan keanggotaan Israel di forum internasional seperti organisasi PBB dan FIFA. Ketiga jenis kampanye ini mengajak masyarakat, pemerintah, dan komunitas internasional untuk menolak segala jenis keterlibatan Israel dalam penindasannya terhadap Palestina. BDS

bergerak tanpa kekerasan yang berlandaskan pada hak asasi manusia dan hukum internasional (Lustick & Shils, 2022). Melalui gerakan ini, komunitas masyarakat Palestina menganggap bahwa tujuan gerakannya bukan hanya untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendapatkan hak mereka kembali, melainkan mereka menganggap masalah yang terjadi pada rakyat Palestina adalah masalah hak universal sehingga tuntutan untuk menyelesaikan masalah ini juga harus beroperasi secara global. Melalui prinsip tanpa kekerasan serta landasan pada hak asasi manusia, gerakan BDS dapat menarik perhatian masyarakat Barat dan mengadvokasi suara global lebih cepat.

Gerakan BDS tidak lepas dari kritik, terutama pada awal masa perkembangannya. Beberapa anggota yang turut mendirikan gerakan ini masih terlibat dalam perjuangan bersenjata sehingga hal ini menyebabkan sedikit ketegangan karena gerakan BDS merupakan gerakan tanpa kekerasan (Lustick & Shils, 2022). BDS mendapat kritik bahwa tujuan mereka yang berusaha meraih hak kesetaraan dan mengakhiri pendudukan Israel dipandang merusak konsensus internasional mengenai solusi dua negara yang ditawarkan. Selain itu, beberapa pihak seperti pemerintah Israel memandang BDS sebagai ancaman besar dan memobilisasi perlawanan terhadap mereka.

Namun, perjuangan gerakan BDS untuk mewujudkan tujuan tidak berhenti. Melalui kampanye digital, advokasi terhadap lembaga masyarakat, serta memperluas jaringan secara global, gerakan BDS perlahan memberikan hasil yang cukup nyata. Telah banyak gerakan BDS di berbagai negara untuk menyuarakan nilai yang sama. Di laman situs resmi gerakan BDS global,

terdapat BDS *campaign/partner* yang menghubungkan akun-akun resmi gerakan BDS dan kampanye mereka di berbagai negara (BDS Movement, n.d.). Beberapa contohnya adalah BDS Portugal dan BDS France yang aktif menyuarakan kampanyenya di situs resmi hingga media sosial. Sementara itu, ada gerakan BDS yang berfokus hanya pada media sosial, seperti BDS Marocco yang aktif dalam Instagram. Namun, tidak dipungkiri jika kegiatan mereka sama-sama berfokus untuk menyuarakan nilai solidaritas terhadap Palestina.

Gerakan BDS bukanlah suatu organisasi, tetapi jaringan aksi yang bersifat desentralisasi dan kolektif (Kim, 2023) sehingga menyebabkan siapa pun—di negara manapun dapat melancarkan aksi ini dan menggalang masyarakat untuk ikut dalam aktivitas kampanye tersebut. Dalam hal ini, banyak kemunculan gerakan BDS di berbagai negara dengan BDS National Committee (BNC) sebagai koordinator secara global (BDS, n.d.). Gerakan BDS tiap negara tidak mewajibkan untuk mengikuti target yang sama pada BDS global asalkan sejalan dengan tiga tuntutan gerakan—mengakhiri pendudukan Israel terhadap Palestina, mengembalikan hak warga Palestina untuk kembali ke tanah asalnya, dan memberikan kesetaraan warga Palestina di Israel.

Indonesia menjadi salah satu negara yang relevan untuk dikaji karena memiliki kombinasi yang unik, yaitu dengan populasi masyarakat beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki sejarah panjang solidaritas diplomatik dengan Palestina sejak sebelum zaman kemerdekaan Indonesia pada 1945 (Umar & Azizah, 2025). Gerakan BDS di Indonesia secara resmi diadopsi secara terstruktur oleh kelompok masyarakat sipil pada 29 Mei 2021 yang juga

dihadiri langsung oleh *co-founder* BDS global, Omar Barghouti (IQRA Perspective, 2021). Meskipun masyarakat Indonesia telah memiliki nilai yang cukup kuat terhadap dukungan kepada Palestina, nilai-nilai global yang dibawa gerakan BDS tetap memerlukan penyesuaian agar selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Gerakan BDS menonjolkan bagaimana nilai global seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dibungkus sedemikian rupa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam perjuangan rakyat Palestina secara tidak langsung (Rothman & Zimmerman, 2019). Ketika gerakan ini masuk ke wilayah Indonesia, nuansa yang diberikan sedikit berbeda dengan masyarakat Indonesia. Hubungan sejarah antara keduanya serta identitas religius yang sama menyebabkan masyarakat Indonesia telah lama mendukung Palestina, entah itu secara diplomatik ataupun kemanusiaan (Umar & Azizah, 2025). Ketika gerakan BDS ini diperkenalkan pada masyarakat Indonesia, pemahaman nilai dan norma global tersebut mengalami proses penyelarasan agar lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang telah ada.

Hal tersebut memunculkan suatu teka-teki akademik, yaitu bagaimana strategi advokasi gerakan BDS dapat menjembatani nilai-nilai universal tersebut melalui simbol yang lebih dikenal dan diterima masyarakat—seperti narasi hubungan Indonesia-Palestina yang telah terjalin sejak lama—sehingga dapat menciptakan dampak yang lebih kuat daripada hanya mengadaptasi langsung dari prinsip BDS global. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menganalisis bagaimana penyelarasan ini bekerja dalam memperkuat

solidaritas masyarakat terhadap Palestina, sembari tetapi juga tetap menjaga posisinya sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi BDS Indonesia dalam menyampaikan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan yang diusung oleh gerakan BDS global, melalui keterlibatannya dalam jaringan advokasi transnasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi-strategi yang digunakan oleh penggerak gerakan BDS di Indonesia dalam mengadvokasikan kepada masyarakat lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam kajian hubungan internasional mengenai gerakan BDS di Indonesia sebagai bagian dari *transnational advocacy network* (TANs).

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada studi hubungan internasional khususnya dalam kajian globalisasi dan transnasionalisme dengan merujuk pada pembahasan penyebaran norma melalui aktor nonnegara. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pendekatan konstruktivisme untuk memahami bagaimana norma global diadvokasikan melalui strategi kampanye yang merupakan bagian dari jaringan advokasi transnasional.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat sipil dan para aktivis digital dalam menyusun strategi advokasi yang efektif untuk menyampaikan nilai dan norma global seperti hak asasi manusia. Penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana strategi advokasi dapat dijalankan oleh aktor lokal dengan memanfaatkan jejaring internasional dan platform digital secara strategis.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Literature Review

Beberapa studi mengenai gerakan BDS telah dibahas banyak dalam ilmu pengetahuan. Gerakan ini bukan gerakan yang baru, metode pergerakannya pun mengadopsi gerakan sosial lain yang telah ada. Berdasarkan penelitian Morrison (2020), gerakan BDS merupakan sebuah seruan global untuk memboikot, mendivestasi, memberikan sanksi terhadap negara Israel hingga mereka mematuhi hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Gerakan yang muncul pada 9 Juli 2005 ini melibatkan lebih dari 170 asosiasi Palestina, serikat buruh, *nongovernmental organization* (NGO), badan amal, dan beberapa kelompok masyarakat Palestina yang lain (Morrison, *Border-crossing repertoires of contention: Palestine activism in a global justice context*, 2020). Dalam literatur lain disebutkan bahwa gerakan BDS awalnya terinspirasi dari PACBI (*Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel*), sebuah gabungan kelompok akademisi,

intelektual, dan penyelenggara masyarakat sipil Palestina, dimana mereka menyerukan kepada lembaga akademis di seluruh dunia untuk memboikot lembaga akademis Israel sebagai bentuk dukungan dalam perjuangan Palestina (Rothman & Zimmerman, 2019).

Gerakan BDS terinspirasi dari berbagai gerakan sosial historis seperti anti-apartheid di Afrika Selatan (Awad, 2020), boikot bus Montgomery di AS, dan taktik boikot masyarakat Sudan untuk menekan pemerintahan mereka yang melakukan pelanggaran HAM (Morrison, *Border-crossing repertoires of contention: Palestine activism in a global justice context*, 2020). Taktik seperti boikot, divestasi, dan sanksi telah terbukti sebagai bentuk perlawanan nonkekerasan yang efektif dalam menekan pelanggaran HAM. BDS mengadaptasi pendekatan ini untuk membangun solidaritas global terhadap Palestina.

Gerakan BDS dibungkus sebagai gerakan nonkekerasan (Rothman & Zimmerman, 2019)—penyampaian pesan dilakukan secara damai tanpa menggunakan senjata meski pihak yang menyampaikan masih menjadi korban yang tertindas. Menurut Rothman & Zimmerman (2019), hal penting agar gerakan nonkekerasan seperti BDS berhasil adalah sorotan dari dunia internasional. Pihak-pihak pertama yang menjalankan gerakan BDS adalah masyarakat Palestina itu sendiri, dimana mereka masih menjadi korban penindasan oleh Israel. Apabila gerakan mereka tidak disorot atau tidak mendapat perhatian dari internasional, aksi ini tidak akan efektif. Gerakan BDS dihubungkan dengan wacana normatif global (Baumgart-Ochse, 2017)

karena BDS mengadopsi nilai-nilai dan norma universal seperti keadilan, kebebasan, hak asasi manusia. Hal ini disebut dengan *collective action frame*, perjuangan lokal Palestina dibingkai sebagai perjuangan berskala global—gerakan BDS mengajak semua masyarakat di dunia untuk mendukung nilai-nilai dan norma universal. Dengan strategi tersebut, gerakan BDS dapat berkembang secara transnasional hingga dikenal secara internasional.

Keempat literatur yang telah disebutkan memiliki beberapa kemiripan tentang sejarah pembentukan BDS dan sebab-sebab BDS dapat menjadi gerakan transnasional yang dapat mengajak seluruh masyarakat sipil secara global. Adapun aspek yang membedakan masing-masing literatur adalah metode atau pendekatan yang digunakan para penulis untuk mencari dan mengumpulkan data. Artikel milik Rothman & Zimmerman lebih bersifat teoritis sehingga pendekatannya menggunakan analisis wacana, pendekatan historis, dan studi kasus terhadap gerakan BDS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gerakan BDS adalah bentuk dari solidaritas transnasional yang baru dalam menentang penindasan dan praktik apartheid Israel. Selain itu, mereka menekankan kepada penelitian selanjutnya untuk mengkaji gerakan BDS secara akademik karena gerakan ini menjadi alat penting dalam perjuangan politik global. Morrison (2020) menulis tentang gerakan BDS sebagai aksi kolektif dengan membangun koalisi lintas sektor, menggunakan analisis konsep *contentious repertoires* dari Charles Tilly. Berdasarkan literatur yang telah ditulis, *contentious*

repertoires adalah rangkaian aktivitas protes atau aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu gerakan sosial. Konsep ini sesuai dengan gerakan BDS yang beraktivitas secara kolektif dan teratur dilakukan oleh masyarakat baik secara lokal hingga transnasional. Selain itu, Morrison (2020) juga menggunakan metode studi kasus dan analisis wacana untuk memahami bagaimana gerakan ini dipersepsikan di ranah global. Sumber-sumber yang didapat menunjukan hasil jika gerakan BDS beroperasi secara horizontal dan desentralistik menyebabkan gerakan ini sulit ditekan secara total. Selain itu, konsep *contentious repertoires* menjelaskan taktik BDS yang berkoalisi dengan gerakan sosial lain dapat mempermudah persebaran gerakan mereka.

Sementara itu, tulisan Awad (2020) dan Baumgart-Ochse (2017) memiliki persamaan dalam metodologi penelitiannya. Tulisan Awad (2020) menjelaskan tentang BDS sebagai strategi utama untuk mendukung solidaritas terhadap rakyat Palestina serta menawarkan saran agar jenis gerakan perjuangan global selain BDS dapat dipertimbangkan. Tulisan Baumgart-Ochse (2017) menjelaskan bagaimana gerakan BDS terhubung dengan *global justice movement* yang menarik dukungan dari aktor-aktor non negara di berbagai belahan dunia.

Penulis juga menambahkan beberapa literatur mengenai gerakan BDS di Indonesia untuk memperkuat konteks topik yang dibawa. Artikel jurnal yang berjudul “Gerakan Sosial Digital; Boikot-Divestasi-Sanksi (BDS) Terhadap Isu Israel-Palestina di Media Sosial” berfokus pada

gerakan BDS yang berhasil memobilisasi opini publik dan aksi melalui media sosial (Ulya & Ayu, 2023). Penelitian lain seperti milik Kumara (2024) membahas tentang gerakan BDS di Indonesia berpotensi untuk memengaruhi kebijakan impor produk pro-Israel ke Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Kumara (2024) menemukan bahwa sebanyak 65% masyarakat Indonesia mendukung boikot produk Israel dan percaya bahwa gerakan sosial ini dapat memengaruhi kebijakan pemerintah.

Kemudian, terdapat literatur yang membahas tentang gerakan BDS (secara global) memiliki strategi *boomerang pattern* untuk mendapat dukungan transnasional di Indonesia (Mardila, 2025). Literatur ini menggunakan kerangka TANS untuk menganalisis strategi gerakan BDS dan berfokus pada strategi *boomerang pattern*. Mardila (2025) menggunakan metode *library research* untuk menemukan bagaimana gerakan BDS memanfaatkan *boomerang pattern* di Indonesia untuk memperkuat dukungan transnasional.

Risalah (2025) yang berjudul “Boikot Divestasi Sanksi (BDS) Indonesia: Gerakan Sosial Digital untuk Solidaritas Palestina” berfokus pada gerakan BDS Indonesia sebagai gerakan sosial digital yang berfungsi untuk memobilisasi massa melalui media digital untuk mendukung perjuangan Palestina serta mengidentifikasi dari kampanye digital terhadap kesadaran dan ketertiban masyarakat. Metode dari penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana BDS

Indonesia memobilisasi masa melalui media sosial dan bagaimana audiens menanggapi gerakan tersebut (Risalah, 2025). Sementara itu, Nabila (2025) dengan penelitiannya yang berjudul “Mobilisasi Kampanye Boikot Produk yang Terafiliasi Israel di Indonesia Melalui Gerakan Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) Tahun 2023-2025” menganalisis BDS Indonesia dengan pendekatan *networked social movements* dari Manuel Castells. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mobilisasi kampanye melalui BDS Indonesia merupakan contoh nyata *networked social movements* yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memicu aksi kolektif masyarakat dalam isu global (Nabila, 2025). Terakhir, terdapat artikel ilmiah yang berjudul “Perbandingan Gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Malaysia dan Indonesia sebagai Perlawanan terhadap Agresi Israel di Palestina” yang metode penelitiannya menggunakan analisis komparatif untuk meneliti kesamaan dan perbedaan dalam penerapan gerakan BDS. Seperti halnya penelitian milik Mardila (2025), artikel ini menggunakan teori *Transnational advocacy networks* (TANs) untuk menjelaskan peran gerakan BDS di masing-masing negara. Hasil dari penelitian ini adalah gerakan BDS Malaysia lebih konsisten dalam tindakan hingga menimbulkan dampak penurunan saham di perusahaan, namun dalam pergerakan BDS Indonesia dinilai lebih selektif dengan dampak yang memberikan penurunan karyawan terhadap perusahaan yang diboikot (Inayah, Darmastuti, Simbolon, & Latifa, 2025).

Kumpulan literatur mengenai gerakan BDS secara global telah mengulas aspek sejarah, strategi, proses pergerakan yang bersifat transnasional, serta hubungannya dengan norma internasional seperti keadilan dan hak asasi manusia. Seperti yang ditulis oleh Rothman & Zimmerman (2019), Baumgart-Ochse (2017), hingga Morrison (2022) telah menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya mengadopsi strategi gerakan sosial historis seperti anti-apartheid, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai normatif universal yang membentuk legitimasi globalnya. Beberapa penelitian lain membahas bagaimana norma mengalami dinamika dan pergesekan ketika mereka masuk ke ranah domestik, seperti studi milik Baumgart-Ochse (2017) yang menekankan pentingnya interaksi aktor dalam mendefinisikan dan mempertahankan nilai-nilai yang diklaim sebagai universal.

Sementara itu, penelitian mengenai gerakan BDS di Indonesia berkembang cukup pesat terutama pasca-eskalasi antara Israel-Palestina tahun 2023. Akan tetapi, literatur yang disebut masih berputar pada analisis dampak dan mekanisme mobilisasi. Risalah (2025), misalnya, memfokuskan bagaimana gerakan BDS Indonesia memobilisasi massa dan memunculkan kesadaran audiens melalui perspektif gerakan sosial digital. Sejalan dengan penelitian tersebut, Nabila (2025) menggunakan pendekatan *networked social movements* dari Manuel Castells untuk melihat bagaimana teknologi digital memicu aksi kolektif secara horizontal. Di sisi lain, dampak dari gerakan ini terdapat dari pengaruh kebijakan impor (Kumara,

2024) serta perbandingan efektivitas antara BDS Indonesia dan BDS Malaysia (Inayah, Darmastuti, Simbolon, & Latifa, 2025).

Meskipun penelitian-penelitian di atas memberikan gambaran mengenai hasil dan metode mobilisasi gerakan, terdapat celah dalam menjelaskan dinamika penyesuaian narasi antara BDS global dengan BDS Indonesia yang beroperasi secara domestik. Penelitian Mardila (2025) memang telah menggunakan kerangka TANS tetapi masih terbatas pada analisis *boomerang pattern* dan subjeknya yang merupakan gerakan BDS global. Berbeda dengan penelitian Risalah (2025) ataupun Nabila (2025) yang fokus pada “bagaimana massa berkumpul”, penelitian ini hadir untuk mengisi celah dengan membedah bagaimana pesan dalam strategi advokasi dikonstruksikan. Fokus utama penelitian ini adalah proses penyelarasan makna dan pemingkakan ulang terhadap nilai dan norma yang dibawa dari BDS global agar selaras dengan identitas serta nilai yang telah dimiliki masyarakat Indonesia terhadap Palestina. Dengan demikian, penelitian ini memosisikan BDS Indonesia sebagai aktor penerjemah yang mengadaptasi agenda transnasional ke dalam konteks lokal melalui keempat strategi TANS.

1.5.2. Kerangka Konseptual

1.5.2.1. *Transnational Advocacy Networks* (TANS)

Konsep *Transnational advocacy networks* (TANS) atau jaringan advokasi transnasional berakar pada pemahaman

konstruktivisme milik Finnemore dan Sikkink (1998). Kedua tokoh tersebut melihat jika norma dibangun secara aktif oleh agen atau aktor. Norma disini dipahami sebagai standar perilaku yang dianggap layak bagi aktor dengan identitas tertentu dan mengandung unsur *oughtness*, dimana pelanggaran terhadapnya menimbulkan reaksi sosial. Agen tersebut disebut dengan *norm entrepreneurs*, dimana aktivitasnya membutuhkan suatu wadah untuk mempromosikan norma mereka di tingkat internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). TANs inilah yang menjadi instrumen *norm entrepreneurs* tersebut.

Lebih lanjut, istilah TANs dipopulerkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dalam bukunya yang berjudul “*Activists Beyond Borders*”, menjelaskan bahwa selain aktor negara, banyak dari jenis aktor nonnegara berinteraksi satu sama lain dan membentuk suatu jaringan yang terstruktur hingga level global. Salah satu jenis aktor tersebut adalah kelompok aktivis, dimana mereka memiliki prinsip suatu nilai atau gagasan yang memperjuangkan hal yang mendorong perubahan (Keck & Sikkink, 1998).

TANs memiliki beberapa ciri utama, dimana yang paling mendasar adalah jaringan ini tidak berdiri atas kepentingan politik atau ekonomi global, melainkan oleh nilai atau ide—dalam hal ini mengandung suatu komitmen moral—untuk mengubah suatu kebijakan atau perilaku tertentu yang dianggap tidak adil. TANs memiliki struktur yang bersifat horisontal—merujuk pada aktor-aktor yang melibatkan

masyarakat sipil secara langsung, tidak memiliki pusat komando dan lebih bersifat hubungan timbal balik dengan aktor TANs lain, serta, jaringan dapat otomatis menyebar ataupun menyusut tergantung pada urgensi isu yang sedang diperjuangkan. Selain itu, TANs juga memiliki *boomerang pattern*, artinya mereka dapat mengandalkan jaringan internasional—yang sudah terbentuk—untuk menekan pemerintah lokal ketika terjadi hambatan dalam proses memperjuangkan isu mereka (Keck & Sikkink, 1998).

Contoh bagian dari aktor tersebut adalah yayasan, *nongovernmental organization* baik level domestik atau internasional, gerakan sosial, media massa, organisasi keagamaan, serikat buruh, kelompok akademisi, dan sebagian lembaga eksekutif atau legislatif di pemerintahan (Keck & Sikkink, 1998). Kelompok-kelompok tersebut memiliki cara masing-masing untuk membingkai isu yang mereka bawa agar bisa diadvokasikan kepada publik atau ke level yang lebih tinggi.

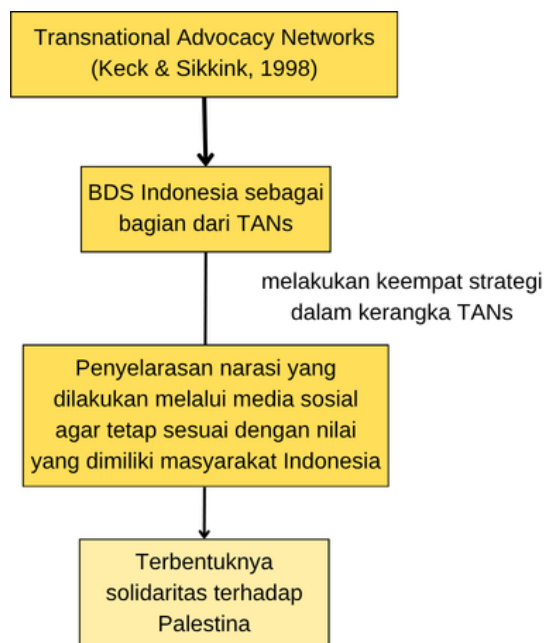
Aktor dalam TANs memiliki empat taktik utama untuk membujuk, menyosialisasikan, dan memberikan tekanan pada target (Keck & Sikkink, 1998). Pertama, *information politics*, yaitu kemampuan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan kredibel serta memindahkan informasi tersebut kepada pihak yang memiliki dampak terbesar. Hal ini artinya para aktor TANs menargetkan—memberikan informasi kepada pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengubah kebijakan sesuai dengan isu yang mereka perjuangkan,

misalnya pemerintah. Kedua, *symbolic politics*, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan simbol, tindakan, atau cerita yang dapat menarik perhatian khalayak umum. Ketiga, *leverage politics*, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan aktor berpengaruh untuk menekan aktor lain. Misalnya ketika aktivis lingkungan yang memiliki hambatan untuk memperjuangkan perubahan kebijakan lingkungan di negaranya memanggil bantuan internasional—aktor lain dalam jaringan advokasi transnasional—untuk menekan pemerintah dalam negaranya. Keempat, *accountability politics*, yaitu upaya untuk menahan aktor berpengaruh—terutama pemerintah pada kebijakan atau prinsip yang telah mereka nyatakan sebelumnya. Ini terjadi ketika pemerintah telah menandatangani perjanjian yang mengandung isu yang diperjuangkan para aktor TANs.

Tentu saja, langkah seperti ini akan efektif hanya jika TANs paham bagaimana cara aktor-aktornya membungkus suatu isu. Hal ini dinamakan dengan *framing* atau pembedaan isu, dimana TANs menggunakan bahasa untuk menafsirkan isu agar beresonansi dengan pemahaman publik. (Finnemore & Sikkink, 1998). Karakteristiknya meliputi adanya unsur kemanusiaan, melibatkan ketimpangan hukum atau ketidakadilan dalam sistem, dan memiliki target yang harus ditekan atau dilawan. Ketika jaringan ini mampu menarik perhatian banyak publik, maka isu yang diperjuangkan akan lebih banyak menciptakan jaringan lain dan advokasi yang dilakukan akan lebih mudah. Selain itu,

aktor TANS juga memiliki proses *frame alignment*, yaitu proses dimana mereka menyelaraskan cara ketika mereka membungkus isu tersebut agar sesuai dengan nilai, kepercayaan, dan budaya masyarakat lokal (Keck & Sikkink, 1998).

Kerangka TANS digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis utama untuk melihat bagaimana BDS Indonesia menjalankan strategi advokasi dalam menyampaikan nilai solidaritas terhadap Palestina kepada masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan keempat strategi dalam TANS untuk melihat bagaimana BDS Indonesia bergerak untuk memperjuangkan nilai solidaritas global terhadap Palestina. Keempat strategi—*information*, *symbolic*, *leverage*, dan *accountability politics*—ditunjukkan dalam unggahan resmi akun BDS Indonesia, aksi kolaborasi mereka dengan aktor lain, lalu bagaimana respon media massa terhadap kampanye yang dilakukan oleh BDS Indonesia.



Bagan 1. 1. Kerangka Pemikiran
(telah diolah oleh penulis)

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konsep

1.6.1.1. Solidaritas

Solidaritas pada dasarnya memiliki tiga unsur ciri utama, yaitu perantara antara individu dan komunitas, bentuk kesatuan, dan suatu hal yang mengandung kewajiban moral (Scholz, 2008). Itulah yang ditulis oleh Sally Scholz dalam bukunya yang berjudul “*Political solidarity*”. Menurutnya, solidaritas tak dapat didefinisikan menjadi satu pengertian tunggal, karena wujud dan maknanya selalu berubah sesuai konteks sosial dimana hal tersebut ditempatkan. Dalam ruang lingkup gerakan sosial yang selalu menjunjung tinggi nilai dan norma, solidaritas selalu diartikan sebagai suatu hal yang muncul karena fenomena ketidakadilan atau penindasan. Solidaritas ini merujuk pada salah satu dari ketiga

solidaritas yang didefinisikan oleh Scholz, yaitu solidaritas politik (*political solidarity*), sebagaimana yang diungkapkan oleh Scholz, yang menyoroti hati nurani individu, komitmen dan tanggung jawab kelompok, serta tindakan kolektif. Ketika individu merasakan ketidakadilan muncul dalam masyarakat, dia akan bergabung dengan orang lain untuk berjuang menentang ketidakadilan tersebut. Kelompok semacam ini seringkali menimbulkan pertanyaan ganda dalam sosial masyarakat, karena mereka bertentangan dengan nilai dan norma yang sudah ada. Akan tetapi, ketika penindasan atau kebijakan yang tidak setara merugikan orang-orang seperti mereka dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, mereka sadar mereka telah mengalami penindasan dan mendapat perlakuan yang tidak adil sehingga mereka berkumpul dan menentukan satu tujuan untuk mengubah kebijakan yang berat sebelah tersebut.

Namun, bukan berarti pemahaman solidaritas politik hanya sebatas itu saja. Setiap individu yang bergabung dalam kelompok bersolidaritas harus menghargai interpretasi masa lalu, masa kini, hingga berbagai visi untuk masa depan (Scholz, 2008). Maksudnya adalah tidak semua orang harus merasakan penindasan atau perlakuan tidak adil terlebih dahulu untuk melakukan tindakan kolektif. Beberapa orang memahami sejarah suatu masyarakat yang kelam dan mereka mengerti apa yang seharusnya masyarakat tersebut ubah di masa depan. Situasi seperti ini juga memunculkan solidaritas politik. Bukan latar

belakang, wilayah, atau kesamaan identitas yang membuat kelompok masyarakat bersatu melakukan tindakan kolektif, tetapi rasa komitmen dan kesadaran yang tinggi terhadap moralitas manusia.

1.6.1.2. Advokasi

Advokasi merupakan tindakan yang membela suatu tujuan, nilai, atau kepentingan, baik untuk individu maupun individu lain (Keck & Sikkink, 1998). Tindakan ini memiliki karakteristik, yaitu digerakkan oleh nilai-nilai—yang berarti tidak hanya sekedar kepentingan materiil, harus memiliki keyakinan terhadap sesuatu misalnya keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Advokasi bertujuan untuk memengaruhi kebijakan, praktik, atau wacana publik sehingga cara yang perlu dilakukan adalah melakukan kampanye, persuasi, atau tekanan terhadap aktor yang berkuasa. Dalam prosesnya, advokasi melibatkan kreativitas—aktor yang melakukan advokasi sering menggunakan simbol dan narasi agar dapat menyuarakan pesan mereka secara efektif dan menarik suara masyarakat.

1.6.1.3. Norma

Norma dipahami sebagai standar perilaku yang dianggap layak atau pantas bagi aktor internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Dalam konteks jaringan transnasional, norma yang diperjuangkan merupakan wujud dari *principled ideas*, berangkat dari keyakinan moral tentang apa yang benar dan salah (Keck & Sikkink, 1998).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Solidaritas

Dalam penelitian ini, solidaritas dipahami sebagai objek dari strategi advokasi yang dilakukan BDS Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya mereka dalam mengajak publik berpartisipasi ke dalam aksi boikot sebagai wujud komitmen moral serta sejauh mana nilai-nilai yang dibawa BDS Indonesia mendapatkan respons (baik mendukung maupun menentang) dari masyarakat di platform digital.

Penelitian ini melihat gerakan BDS muncul akibat adanya ketidakadilan yang ditimbulkan oleh Israel dengan penindasannya terhadap rakyat Palestina. Masyarakat secara kolektif tanpa memandang latar belakang memiliki kesadaran penuh untuk menentang ketidakadilan. Solidaritas semacam ini termasuk dalam solidaritas politik. Masyarakat melalui gerakan BDS memiliki visi dan misi yang sama tentang keadilan dan kesetaraan.

1.6.2.2. Advokasi

Penelitian ini mengoperasionalkan advokasi sebagai upaya sistematis yang dilakukan para aktor dalam gerakan BDS di Indonesia untuk mengampanyekan nilai-nilai dalam gerakan BDS di media sosial, mencakup jenis pesan, bentuk komunikasi visual, dan narasi persuasif kepada publik agar mereka berpartisipasi dalam aksi gerakan BDS.

1.6.2.3. Norma

Dalam penelitian ini, norma dipahami sebagai standar perilaku yang dianggap pantas dalam merespons ketidakadilan, dimana BDS Indonesia sebagai *norm entrepreneur* memperjuangkan nilai solidaritas yang ada dalam gerakan BDS untuk menciptakan tekanan terhadap pihak yang terafiliasi dengan Israel. Norma dipandang sebagai instrumen strategi advokasi untuk mengubah praktik dan kebijakan aktor yang berkuasa.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa BDS Indonesia, sebagai bagian dari TANs, melakukan keempat strategi dalam kerangka TANs—*information, symbolic, leverage, dan accountability politics* untuk menggalang solidaritas terhadap Palestina. Melalui pemanfaatan media sosial, BDS Indonesia berperan sebagai aktor yang menyelaraskan nilai dalam gerakan BDS agar relevan dengan identitas yang dimiliki masyarakat Indonesia. Proses ini merupakan bagian dari keempat strategi advokasi yang bertujuan untuk menciptakan tekanan moral terhadap aktor-aktor yang terafiliasi dengan pendudukan di Palestina melalui pembentukan solidaritas yang terstruktur.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk

memahami makna, interpretasi sosial, dan konteks dari fenomena serta data-data yang diperoleh menggunakan data nonnumerik yang dianalisis secara kontekstual untuk menggali pemahaman mendalam (Lamont, 2022). Fokus dari metode ini adalah pengumpulan dan analisis informasi dalam berbagai bentuk nonangka seperti narasi, deskripsi, atau observasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami bagaimana gerakan BDS di Indonesia mengadvokasi nilai solidaritas terhadap Palestina sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional. Metode ini memungkinkan penulis mengeksplorasi makna, dinamika, dan strategi kampanye yang digunakan oleh BDS Indonesia dalam menyampaikan norma global melalui ruang digital.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif deskriptif-interpretatif. Tipe ini berfokus pada pemahaman makna dari pengalaman atau pengamatan melalui proses deskripsi dan interpretasi yang sistematis (Elliott, Kingwill, & Timulak, 2021). Penelitian bertujuan untuk menggambarkan strategi BDS Indonesia dalam menyampaikan norma solidaritas terhadap Palestina, sekaligus menginterpretasikan makna dan narasi yang dibangun dalam proses tersebut. Dengan menggunakan konstruktivisme sebagai pendekatan teoretis dan kerangka *Transnational advocacy networks* (TANs), penelitian ini menelaah bagaimana aktor nonnegara berperan dalam produksi dan penyebaran norma di tingkat lokal.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi atau tempat di mana proses pengumpulan data penelitian dilakukan (Blaxter, Hughes, & Tight, 2006). Jenis lokasi dapat saja berupa tempat fisik seperti kantor, komunitas, sekolah, hingga berupa ruang nonfisik atau ruang maya seperti media sosial. Pemilihan lokasi merupakan hal yang penting karena dapat memengaruhi akses data serta validitas dari hasil penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi secara nonfisik atau dalam jaringan, berfokus pada platform resmi milik BDS Indonesia. Peneliti melakukan penelusuran dan dokumentasi terhadap konten kampanye visual (infografis dan narasi teks) pada akun Instagram resmi @gerakanbds dan akun X @GerakanBDS_ID. Peneliti juga mengakses situs resmi bdsmovement.net untuk memahami strategi kampanye resmi yang menjadi *guideline* bagi aktor BDS di negara lain serta situs resmi BDS Indonesia gerakanbds.id.

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu *co-founder* Gerakan BDS Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk menggali motif dan strategi dibalik penyampaian kampanye gerakan BDS dan apa saja simbol-simbol yang digunakan dalam proses advokasi mereka.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau organisasi yang menjadi sumber data utama dalam penelitian (Blaxter, Hughes, & Tight, 2006). Pemilihan subjek penelitian harus sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian sehingga penulis perlu mempertimbangkan karakteristik subjek agar data yang diperoleh relevan. Penelitian ini mengambil BDS

Indonesia sebagai subjek yang berperan sebagai *node* dalam jaringan advokasi transnasional. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu *co-founder* BDS Indonesia, yaitu Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M. Ph.D.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif bersifat tidak terstruktur, karena bukan berupa data numerik dan proses pengambilannya melalui wawancara, observasi, etnografi atau diskusi kelompok (Lamont, 2022). Contoh dari jenis data kualitatif meliputi hasil wawancara, penelitian terdahulu, dokumen resmi suatu lembaga, *website*, konten digital, dan visual data. Data dari penelitian ini berupa teks narasi, takarir, simbol-simbol visual yang merepresentasikan gerakan BDS, unggahan konten dalam situs BDS Indonesia dan media sosial mereka, serta artikel dan pernyataan publik dari media massa. Data-data tersebut digunakan untuk menganalisis strategi advokasi yang dijalankan oleh BDS Indonesia dalam menyampaikan norma solidaritas global melalui jejaring transnasional.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui metode seperti wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan partisipan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Penelitian ini mengambil sumber data primer berupa

hasil wawancara dengan salah satu *co-founder* BDS Indonesia, yaitu Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M. Ph.D.. Posisi narasumber dalam penelitian ini berfungsi sebagai informan kunci untuk melakukan verifikasi serta triangulasi data terhadap temuan yang diperoleh Penulis melalui data sekunder. Wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi aspek-aspek internal yang tidak terekam dalam dokumen publik, khususnya mengenai mekanisme koordinasi antara BDS Indonesia dengan jaringan BDS global. Penulis memosisikan hasil wawancara bukan sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai data pembanding untuk menghindari bias informasi.

Sumber data sekunder merupakan data-data yang telah ada sebelumnya dan digunakan oleh peneliti untuk dianalisis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Contoh dari sumber data ini adalah dokumen, arsip, laporan, artikel atau jurnal penelitian, dan data statistik pemerintah. Penelitian ini mengambil sumber data primer berupa hasil observasi terhadap subjek melalui media sosial—unggahannya Instagram (@gerakanbds), X (@GerakanBDS_ID), dan dokumen resmi yang diambil dari situs web *bdsmovement.net* juga digunakan untuk mengetahui bagaimana gerakan BDS dapat mengarahkan aktor BDS lokal (termasuk Indonesia) bergerak di dalam negeri masing-masing. Penulis juga mengambil data dari sumber sekunder lain seperti artikel, media massa, jurnal penelitian, atau sumber lain yang relevan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara terstruktur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa unggahan media sosial Instagram dan X dari BDS Indonesia, dan artikel terkait gerakan BDS di Indonesia dalam rentang waktu 2022 – 2025. Penulis menentukan data pada unggahan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu Palestina dan kasus gerakan boikot dalam negeri. Unggahan yang dipilih telah mendapatkan respons publik secara signifikan serta telah masuk dalam media massa sebagai bentuk validasi eksternal.

Sementara itu, wawancara terstruktur merupakan wawancara berdasarkan prosedur yang sudah disusun secara sistematis (Esterbeg, 2002). Penulis memberikan daftar pertanyaan kepada narasumber wawancara dan melakukan sesi wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah diberikan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan tema-tema yang telah ditemukan pada tahap analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) dengan kerangka teori TANs. Langkah-langkah interpretasi data meliputi

- 1) Analisis strategi TANs: Penulis menginterpretasikan tema yang ditemukan berdasarkan empat taktik utama TANs menurut Keck &

Sikkink (*information politics, symbolic politics, leverage politics, accountability politics*);

- 2) Analisis penyelarasan strategi: Penulis menginterpretasikan bagaimana keempat taktik di atas disesuaikan dengan konteks lokal dengan meliputi *framing* atau pembingkaihan isu, bagaimana nilai dan norma global dikemas melalui narasi yang relevan dengan nilai-nilai lokal guna membangun solidaritas yang lebih kuat;
- 3) Hubungan jaringan: Penulis menginterpretasikan peran BDS Indonesia sebagai *node* (jaringan)—BDS Indonesia tidak sekedar menerima instruksi dari BDS global, tetapi secara aktif merekonstruksi pesan tersebut;
- 4) Generalisasi: Penulis menghubungkan hasil analisis data primer dan data sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.8. Kualitas Data

Untuk menjamin kualitas data dalam penelitian ini, digunakan prinsip triangulasi. Prinsip ini merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Abdussamad, 2021). Tujuan dari triangulasi terdapat pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam penelitian ini, triangulasi terdiri dari: data dari hasil wawancara dengan inisiator BDS Indonesia, analisis terhadap tema yang muncul di media sosial BDS Indonesia, dokumen BDS global sebagai rujukan utama aktor BDS lokal, serta media massa dan artikel ilmiah lain

untuk sebagai pihak yang menerima efek dari gerakan BDS. Penulis melakukan verifikasi silang antara data utama dengan berbagai sumber data pendukung untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.